
EKSISTENSI NEGARA
DALAM DINAMIKA
SOSIAL POLITIK ABAD 21

EKSISTENSI NEGARA DALAM DINAMIKA SOSIAL POLITIK ABAD 21

Editor:
Hafid Adim Pradana
Demeiati Nur Kusumaningrum



Inteligensia Media
2020

Eksistensi Negara dalam Dinamika Sosial Politik Abad 21

Penulis:

Saiman

Moch. Aan Sugiharto

Dyah Estu Kurniawati

Awan Setia Dharmawan

Asep Nurjaman

Ali Roziqin

Achmad Apriyanto Romadhon

Sugeng Winarno

Iradhath Taqwa Sihidi

Najamuddin Khairur Rijal

Dedik Fitra Suhermanto

Heavy Nala Estriani

Hafid Adim Pradana

Demeiati Nur Kusumaningrum

Editor:

Hafid Adim Pradana

Demeiati Nur Kusumaningrum

ISBN: 978-623-6548-17-2

Copyright © September, 2020

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm ; Hal: xvi + 208

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari pihak penerbit.

Cover: Rahardian Tegar Lay Out: Nur Saadah

Edisi I, 2020

Diterbitkan oleh:

Pusat Kajian Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Malang Jl. Raya Tlogomas no. 246 Malang Telp: (0341) 464318 psw. 132

Bekerja sama dengan Inteligensia Media (Intrans Publishing Grup)

Anggota IKAPI No. 196/JTI/2018

Dicetak oleh **PT. Cita Intrans Selaras**

Wisma Kalimetro, Jl. Joyosuko Metro 42 Malang

Telp. 0341-573650

Email: intrans_malang@yahoo.com

Pengantar Dekan

FISIP UMM

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera,

Alhamdulillah atas keberkahan waktu dan nikmat kesehatan yang senantiasa Allah SWT berikan kepada kita semua. Selamat atas terbitnya buku kumpulan karya dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang (FISIP UMM).

Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak/Ibu dosen FISIP UMM yang telah berkenan menyajikan gagasan dan kajian kritisnya terhadap isu-isu kontemporer yang menarik ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada tim Pusat Kajian Sosial Politik (PKSP) FISIP UMM dalam yang dalam tiga tahun ini mampu memberikan stimulus bagi seluruh dosen FISIP UMM untuk terus berkarya membangun iklim akademik yang *berkemajuan*.

Dengan terbitnya buku ini, semoga semangat berbagi dan berkarya dosen-dosen FISIP UMM semakin meningkat dan hasil dari berbagai kajian dalam buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang sosial humaniora.

Salam sukses dan selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Malang, September 2020

Dekan FISIP UMM

Dr. Rinikso Kartono, M.Si

Pengantar Editor

Sebagai entitas utama dalam politik dunia, awal mula keberadaan negara tidak dapat dilepaskan dari berlakunya perjanjian Westphalia tahun 1648 yang merupakan permulaan dari terbentuknya sistem negara-bangsa. Perjanjian Westphalia sendiri sebenarnya merupakan kesepakatan penghentian perang antara koalisi negara-negara Uni Evangelis dan Kekaisaran Romawi Suci yang bertikai dalam pertempuran berdarah selama kurun waktu 30 tahun. Secara umum Perjanjian Westphalia berisi dua poin utama. Pertama, masing-masing pihak yang terlibat dalam pertempuran, tidak diperbolehkan mewajibkan keyakinan agama tertentu terhadap masyarakat di wilayah yang dikuasai oleh pihak lain. Kedua, keyakinan beragama hanya boleh diwajibkan oleh penguasa terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah yang ia kuasai.

Keberadaan Perjanjian Westphalia berimplikasi pada pelemahan posisi politis Kekaisaran Romawi Suci yang tidak lagi leluasa untuk

melakukan ekspansi wilayah dengan motif penyebaran agama. Selain itu berlakunya Perjanjian tersebut juga berdampak pada menguatnya hak kontrol penguasa atas masyarakat di wilayah kekuasaannya dan adanya keharusan untuk menghormati para penguasa lain yang juga memiliki wilayah dan masyarakat yang mereka kuasai. Dengan demikian, secara tidak langsung Perjanjian Westphalia memunculkan apa yang kemudian kita kenal sebagai kedaulatan.

Secara umum, kedaulatan dapat dipahami sebagai kewenangan untuk menguasai suatu wilayah beserta apa yang ada di dalamnya tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Suatu negara dapat disebut berdaulat jika memenuhi dua syarat utama. Pertama, adanya penguasa yang mendapatkan kesediaan untuk dipimpin dari masyarakat di wilayah kekuasaannya. Kedua, adanya pengakuan dari penguasa-penguasa lain yang menguasai wilayah-wilayah di luar kekuasaannya. Pada gilirannya “syarat kedaulatan” ini menjadi salah satu ciri pokok dari sistem negara-bangsa Westphalian yang kemudian menyebar ke seluruh dunia.

Secara historis proses penyebaran sistem negara-bangsa Westphalian berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama atau Tahap “Eropa” berlangsung selama satu abad sejak berlakunya Perjanjian Westphalia. Selama kurun waktu tersebut negara-negara Eropa saling melakukan penaklukan satu sama lain guna memperluas wilayah kekuasaan atau melepaskan diri dari belenggu kuasa pihak lain. Tahap ini berujung pada semakin kuatnya negara-negara seperti Perancis dan Inggris, melemahnya Kekaisaran Romawi Suci yang berujung pada berdirinya banyak negara kepangeranan di wilayah Jerman dan Italia, hingga lepasnya Belanda dan Portugal dari kekuasaan Spanyol.

Sementara itu tahap kedua berlangsung pada pertengahan abad ke-18 hingga akhir abad ke-19. Tahap ini banyak diwarnai oleh peperangan negara-negara Eropa dalam memperebutkan wilayah koloni di luar Eropa yang kemudian berakibat pada pelemahan internal negara-negara yang terlibat dalam peperangan. Hal ini pada gilirannya berdampak pada terjadinya pemberontakan masyarakat di wilayah koloni hingga berujung pada terbentuknya negara-negara baru seperti Amerika Serikat (AS), Kanada, serta negara-negara di wilayah Amerika Selatan yang muncul serentak pada abad ke-19.

Adapun tahap ketiga berlangsung pada sepanjang abad ke-20. Berbeda dengan dua tahap sebelumnya, penyebaran sistem negara-bangsa Westphalia pada tahap ini banyak diwarnai oleh upaya pelepasan wilayah-wilayah koloni di Asia dan Afrika dari imperialisme negara-negara Eropa. Konsekuensinya hingga pertengahan abad ke-20 lebih dari 150 negara baru telah hadir dan menandai tersebarnya sistem negara bangsa Westphalia ke seluruh belahan dunia.

Menguatnya posisi sentral negara semakin mendapatkan legitimasi akademis seiring dengan berkembang pesatnya kajian tentang eksistensi negara-negara, yang dimulai dengan kemunculan dan dominasi perspektif realisme dalam disiplin ilmu hubungan internasional yang sangat “negara-sentris”, hingga munculnya revolusi behavioralis yang berujung pada kelahiran beberapa kajian baru seperti analisa politik luar negeri maupun perbandingan politik dan pemerintahan negara-negara. Keberadaan berbagai kajian yang lahir dan berkembang pesat di AS maupun Eropa tersebut tentunya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan AS guna meluaskan pengaruh ideologisnya dalam Perang Dingin.

Perang Dingin sendiri merupakan istilah yang banyak dipakai oleh para politisi maupun akademisi dalam menggambarkan perebutan kuasa hegemoni global antara AS dan Uni Soviet pasca Perang Dunia II. Selama masa Perang Dingin hingga akhir abad ke-20, keberadaan negara sebagai entitas politik utama semakin mengakar kuat seiring dengan menjamurnya literatur akademis yang mengkaji tentang bagaimana negara mempertahankan eksistensinya dalam kondisi politik dunia yang anarki.

Menjelang abad ke-21, posisi sentral negara mulai goyah seiring dengan mulai munculnya berbagai aktor non-negara yang dipandang dapat turut serta memberikan pengaruh dalam politik dunia. Momentum menguatnya peran aktor non-negara bermula pada akhir Perang Dingin yang ditandai oleh runtuhnya Uni Soviet pada Desember 1991. Sejak saat itu, perhatian negara-negara tidak lagi berfokus pada bagaimana menyikapi persaingan politik antara AS dan Uni Soviet. Lebih jauh dari itu, banyak negara mulai hirau pada persoalan-persoalan yang sebelumnya terlupakan sejak pertengahan dekade abad ke-20, seperti isu tentang hak asasi manusia hingga ancaman pemanasan global. Dari sini kemudian mulai

bermunculan aktor-aktor baru seperti organisasi internasional non pemerintah yang gencar menyuarakan akan pentingnya perhatian terhadap isu kemanusiaan, lingkungan, hingga kesetaraan gender. Hal ini pada gilirannya turut berpengaruh pada berkembangnya kajian-kajian akademis mengenai peran aktor non negara.

Seiring waktu, keberadaan aktor non negara menjadi semakin diperhitungkan bersamaan dengan momentum peristiwa pengeboman gedung *World Trade Centre* di AS pada 11 September 2001. Peristiwa tersebut tidak hanya mengubah orientasi negara-negara akan pentingnya memerangi terorisme, tetapi juga menempatkan kelompok-kelompok non-negara sebagai aktor yang tidak bisa lagi diabaikan begitu saja. Selain keberadaan aktor non negara, tantangan lain yang harus dihadapi oleh negara pasca pergantian milenium ialah semakin pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Kesigapan negara dalam merespons cepatnya transformasi teknologi dan peralihan informasi menjadi salah satu kunci untuk dapat bertahan dari berbagai persoalan dan ketidakpastian masa depan pada abad ke-21, baik dalam ranah internal maupun eksternal.

Berangkat dari paparan singkat di atas, buku ini hadir sebagai salah satu dari sekian banyak usaha akademis yang bertujuan menyajikan berbagai tulisan tentang upaya negara mempertahankan eksistensinya di tengah dinamika sosial politik pada abad ke-21. Secara keseluruhan buku ini terdiri dari 14 tulisan dosen-dosen FISIP UMM, yang terbagi dalam tiga bagian. Bagian pertama terdiri dari empat tulisan yang secara umum membahas mengenai kehadiran negara dalam kehidupan politik sebagai respon atas berbagai tantangan internal. Tulisan pertama dari Saiman memaparkan bagaimana percepatan pembangunan menjadi instrumen negara untuk mengatasi berbagai persoalan di daerah tertinggal. Sedangkan Moch. Aan Sugiharto dalam tulisan kedua menyoroti akar masalah dan solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah transportasi publik. Sedikit berbeda dari dua tulisan sebelumnya, Dyah Estu Kurniawati dalam tulisan ketiga di buku ini menjelaskan proses penerapan ide *Open Government Partnership* di Kabupaten Bojonegoro sebagai upaya pembentukan tata kelola pemerintahan yang ideal. Adapun tulisan keempat dari Awan Setia Dharmawan lebih melihat

tentang pentingnya peran warga negara, khususnya generasi milenial, dalam menyikapi persoalan lingkungan hidup.

Sementara itu bagian kedua terdiri dari lima tulisan yang membahas tentang tantangan negara dalam praktik demokrasi. Bagian ini dibuka oleh tulisan Asep Nurjaman yang memaparkan pragmatisme partai politik dan konstituen di Malang Raya pasca Orde Baru, yang diikuti oleh tulisan dari Ali Roziqin yang menggambarkan perebutan suara masyarakat generasi milenial dalam pemilihan umum tahun 2019. Adapun Achmad Apriyanto Romadhon, pada tulisan ketiga di bagian ini menjelaskan tentang bagaimana kekerasan menjadi salah satu strategi yang jamak dipakai pada pemilihan kepala desa di Madura. Sedangkan tulisan keempat oleh Sugeng Winarno membahas mengenai partisipasi generasi milenial dalam pemilihan kepala daerah di Kota Malang tahun 2018. Bagian kedua ini ditutup oleh tulisan dari Iradhat Taqwa Sihidi yang mengkaji tentang volunterisme politik masyarakat generasi milenial di Indonesia.

Sedikit berbeda dengan dua bagian sebelumnya, bagian ketiga pada buku ini menjelaskan tentang bagaimana negara merespons lingkungan eksternal maupun internal, khususnya dalam kaitannya dengan isu kedaulatan dan kemanusiaan. Bagian ini terdiri dari lima tulisan. Dua tulisan awal dalam bagian ini sama-sama mengkaji tentang isu kedaulatan di Asia Tenggara. Tulisan pertama dari Najamuddin Khairur Rijal membahas tentang capaian kepentingan nasional Indonesia dalam *ASEAN Maritime Forum*, yang dilanjutkan oleh Dedik Fitra Suhermanto yang berfokus pada tinjauan konseptual tentang kedaulatan dan intervensi kemanusiaan di Asia Tenggara. Sedangkan Heavy Nala Estriani dalam tulisan ketiga pada bagian ini berupaya membedah sengketa antara Israel dan Lebanon dalam memperebutkan klaim wilayah maritim. Sementara itu, Hafid Adim Pradana dalam tulisan keempat di bagian ini mengkaji tentang respon negara dalam menyikapi isu kemanusiaan melalui pemaparan upaya Kanada dalam menempatkan prinsip *Human Security* sebagai bagian dari orientasi politik luar negerinya. Adapun, Demeiati Nur Kusumaningrum pada tulisan penutup di buku ini berfokus menjelaskan transformasi konflik pasca erupsi Gunung Merapi melalui negosiasi relokasi kawasan rawan bencana.

Berbagai tulisan dalam buku ini diharapkan tidak hanya sebatas memberikan tambahan wawasan bagi pembaca umum, tetapi juga menjadi stimulus bagi akademisi untuk melakukan riset lanjutan tentang bagaimana negara merespons berbagai tantangan yang muncul di masa depan, khususnya seiring dengan semakin cepatnya transformasi teknologi dan persebaran arus informasi. Meskipun demikian, sebagai insan yang masih jauh dari kesempurnaan, tulisan-tulisan dalam buku ini tentunya tidak lepas dari segala kekurangan. Hanya saja, berbagai gagasan yang tertuang dalam bentuk tulisan akan lebih abadi jika dibandingkan dengan gagasan-gagasan yang hanya tersimpan dalam memori pikiran. Atas dasar itulah buku ini dihadirkan bagi pembaca sekalian. Selamat membaca.

Malang, September 2020

Editor

Pengantar Penerbit

Untuk mengarungi rimba kehidupan, dibutuhkan seperangkat norma dan aturan bersama. Ia mesti dipegang teguh oleh semua individu dan berfungsi sebagai perekat dan pengaman. Sehingga tidak terjadi *chaos*, atau pun kondisi ketakberaturan lain. Akibat egoisme masing-masing individu untuk memenuhi hasrat dan kepentingannya semata, dan mengesampingkan hajat dan kepentingan bersama yang lebih luas. Lalu, untuk memastikan seperangkat norma dan aturan dipatuhi, dibutuhkan organisasi kekuasaan yang memiliki otoritas tertentu. Ia diberi wewenang untuk membentuk aturan-aturan bersama. Dan, ketika aturan itu mandek atau pun tidak dijalankan oleh individu atau kelompok tertentu, maka hukuman sejenisnya patut diberikan. Entah berupa kerja sosial, denda, hingga penjara.

Organisasi kekuasaan dimaksud, dalam kehidupan modern sekarang, kita temui eksistensinya dalam wujud negara. Ia memang

kompleks, sekompleks perdebatan tak henti politisi soal masalah krusial apa yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, yang muncul musiman tiap datang hajatan Pemilu atau pun Pilkada. Tapi yang jelas, beberapa hal akan saling bersinggungan, terkait distribusi kekuasaan dan penggunaannya; wewenang dan legitimasi politik; hingga kebijakan ekonomi, sosial dan politik menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, kajian akademis tentang institusi politik dan kekuasaan negara selalu berkembang dan menantang dari waktu ke waktu.

Secara garis besar, buku ini menyajikan berbagai tulisan tentang upaya negara mempertahankan eksistensinya di tengah dinamika sosial politik abad 21. Di dalamnya berisikan 14 tulisan dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, yang terbagi menjadi tiga tema besar. Pertama, terkait kehadiran negara dalam kehidupan politik sebagai respons atas berbagai tantangan internal. Kedua, soal tantangan negara dalam praktik demokrasi. Terakhir, menyangkut respons negara terhadap lingkungan eksternal maupun internal, khususnya dalam isu kedaulatan dan kemanusiaan. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi khalayak luas, khususnya bagi yang tertarik mendalami isu negara, demokrasi, dinamika sosial politik abad 21.

Selamat membaca ...

Daftar Isi

Pengantar Dekan FISIP UMM ... v

Pengantar Editor ... viii

Pengantar Penerbit ... xiii

Daftar Isi ... xv

KEHADIRAN NEGARA DALAM KEHIDUPAN POLITIK ... 1

Percepatan Pembangunan sebagai Solusi Pemerintah Mengatasi
Permasalahan di Daerah Tertinggal

Oleh: Saiman ... 2

Akar Masalah dan Solusi Persoalan Transportasi Indonesia

Oleh: Moch. Aan Sugiharto ... 21

Proses Lokalisasi Ide *Open Government Partnership* di Kabupaten
Bojonegoro

Oleh: Dyah Estu Kurniawati ... 33

Politik, Lingkungan, dan Milenial

Oleh: Awan Setia Dharmawan ... 46

TANTANGAN NEGARA DALAM PRAKTIK DEMOKRASI ... 57

Pragmatisme Partai Politik dan Konstituen Malang Raya Pada
Pemilihan Umum Pasca Orde Baru

Oleh: Asep Nurjaman ... 58

Perebutan Suara Milenial dalam Proses Elektoral 2019

Oleh: *Ali Roziqin ...* 78

Politik Kekerasan Dalam Pemilihan Kepala Desa di Madura

Oleh: *Achmad Apriyanto Romadhon ...* 89

Partisipasi Politik Daring Generasi Milenial Dalam Pilkada Kota Malang 2018

Oleh: *Sugeng Winarno ...* 99

Volunterisme Politik Kaum Milenial Indonesia

Oleh: *Iradhat Taqwa Sihidi ...* 114

UPAYA NEGARA MERESPONS ISU KEDAULATAN DAN KEMANUSIAAN ... 133

ASEAN Maritime Forum dan Pencapaian Kepentingan Nasional Indonesia

Oleh: *Najamuddin Khairur Rijal ...* 134

Tinjauan Konseptual Kedaulatan versus Intervensi Kemanusiaan Dalam Hukum Internasional di Asia Tenggara

Oleh: *Dedik Fitra Suhermanto ...* 147

Sengketa Lebanon dan Israel terkait Delimitasi Batas Maritim

Oleh: *Heavy Nala Estriani ...* 162

Human Security sebagai Prinsip Politik Luar Negeri Kanada

Oleh: *Hafid Adim Pradana ...* 174

Negosiasi Relokasi Kawasan Rawan Bencana III sebagai Wujud Transformasi Konflik Pasca Erupsi Gunung Merapi

Oleh: *Demeiati Nur Kusumaningrum ...* 183

Biodata Penulis ... 204